

**PERAN JEJARING KERJA
DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI PANTI SOSIAL BINA KARYA PANGUDI LUHUR BEKASI**

***THE ROLE OF NETWORKING AND PARTNERSHIP ON SOCIAL SERVICES FOR
HOMELESS DRIFTER AND BEGGARS IN PANTI SOSIAL BINA KARYA PANGUDI
LUHUR BEKASI***

Ruaida Murni

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III Jakarta Timur
E-mail : ruaidamurni@yahoo.co.id

Diterima: 18 Maret 2016; Direvisi: 26 Mei 2016; Disetujui : 30 Mei 2016

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi kasus dan bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran jejaring kerja di panti sosial Bina Karya Pangudi Luhur dalam memberikan pelayanan prima kepada warga binaan sosial, sehingga dapat mewujudkan tujuan panti sosial yaitu eks warga binaan sosial yang mandiri dan dapat berpartisipasi di masyarakat. Informan dalam penelitian ini pekerja sosial, instansi terkait dan eks warga binaan sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD) dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran jejaring kerja dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial terlihat mulai dari pra rehabilitasi, rehabilitasi (intervensi) dan pasca rehabilitasi. Jejaring kerja dapat membantu mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan PSBKPL Bekasi kepada warga binaan sosial, namun peran jejaring kerja pada setiap tahap kegiatan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh PSBKPL Bekasi.

Kata Kunci : peran, jejaring kerja, pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Abstract

This study has aimed to describe the role of partnership on social rehabilitation for homeless drifter and beggars in Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur. Its a kind of case study that uses qualitative approach. Informans covers social workers, related institutions and ex beneficiaries. Data has compiled by indepth interview, focused group discussion (FGD)and documentary study. The result of study shows that networking and partnership has conducted since pre rehabilitation, during rehabilitation and after rehabilitation. Networking and partnership have seen as significant factors on optimizing social services for beneficiaries. However, those partnership has not optimum worked.

Keywords: role, networking, social services and rehabilitation.

PENDAHULUAN

Gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial di kota-kota besar, karena sulitnya kehidupan di pedesaan sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk dan tanah garapan yang semakin hari semakin berkurang. Sementara masyarakat desa pada umumnya adalah para petani, yang sebagian besar merupakan petani penggarap dan miskin. Terpaksa mereka mencari tempat penghidupan lain yang diharapkan dapat memberikan harapan masa depan yang lebih baik, dengan pergi merantau ke kota. Daya tarik perkembangan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi di kota-kota yang cukup pesat, menimbulkan arus perpindahan penduduk dari perdesaan ke daerah perkotaan. Arus penduduk ini lebih lagi bertambah parah dengan adanya daya dorong yakni pembangunan di perdesaan sangat ketinggalan.

Urbanisasi ini mengakibatkan berbagai masalah sosial, ekonomi, budaya, seperti meningkatnya kepadatan penduduk di daerah perkotaan yang dapat menimbulkan benturan nilai-nilai sosial, karena sebagian besar merupakan warga miskin, tidak mempunyai keterampilan, pendidikan terbatas sehingga tidak mampu menyesuaikan diri dengan pola kehidupan perkotaan.

Akibat ketidak-mampuan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan di kota-kota besar terutama di sektor formal, maka mereka menerima pekerjaan apapun dengan upah berapapun, hanya sekedar untuk mempertahankan hidupnya. Akibatnya mereka terpaksa tinggal di kolong jembatan, pinggiran rel kereta api, bantaran sungai bahkan di kaki lima pertokoan dan sebagainya, karena tidak mampu menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya. Hal ini terlihat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, ada

kecenderungan bahwa kompleksitas kehidupan gelandangan dan pengemis yang semakin rumit. Bahkan satu individu dapat mengalami dua atau lebih kategori permasalahan sekaligus. Mereka mengalami keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam kondisi seperti ini mereka membutuhkan dukungan, terutama dari negara melalui peran pemerintah. Data Pusdatin Kesos tahun 2014 yang dihimpun dari data program unit teknis, menunjukkan jumlah gelandangan 19.799 dan pengemis 19.861.

Salah satu program pemerintah melalui Kementerian Sosial RI adalah rehabilitasi sosial melalui Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur. Panti ini bertugas untuk melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya gelandangan dan pengemis. Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur (selanjutnya disebut PSBKPL) Bekasi sebagai lembaga pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, melaksanakan kegiatannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis, agar mampu berperan dalam pembangunan, minimal untuk dirinya sendiri dan keluarganya.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Kemudian Keputusan Presiden RI No. 40 /1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Serta Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 30/HUK/96 tentang Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti. Melalui usaha ini para gelandangan dan pengemis mendapat pembinaan dan pendidikan untuk memulihkan mereka agar dapat berfungsi secara sosial dan ekonomi. Wujud usaha yang bersifat rehabilitatif adalah dengan ditentukannya metode pelayanan yang dikenal

dengan sistem dalam panti yang sebelumnya dikenal dengan sistem Lingkungan Pondok Sosial (Liposos), sesuai dengan Kep. Mensos yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial RI.

Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI yang mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitasi, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi, bimbingan lanjut bagi gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu mandiri, dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standart pelayanan dan rujukan (PP Mensos Nomor: 106/HUK/2009).

Namun pada kenyataannya PSBKPL masih memiliki keterbatasan, baik dari segi SDM maupun sarana prasarana, dalam melaksanakan pelayanan sosial dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis. Situasi ini diatasi dengan membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Lembaga ini membangun jejaring kerja dengan harapan bahwa kinerja panti ini akan meningkat. Persoalan yang muncul kemudian adalah, bagaimana bentuk relasi atau kerjasama yang dibangun dengan jejaring kerja sehingga berpengaruh positif kepada panti ini, dan bagaimana peran jejaring kerja dalam proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan panti selama ini.

Pertanyaan ini penting, mengingat hasil penelitian Widodo dkk (2009), menunjukkan bahwa beberapa tahap pelaksanaan kegiatan yang seyogyanya melibatkan tenaga ahli di bidangnya belum terlaksana, peran dari lembaga pengirim maupun masyarakat sekitar

belum optimal sehingga eks klien yang seharusnya masih mendapatkan bimbingan dari pihak-pihak yang terkait, pada saat mereka memulai pengembangan dirinya di masyarakat dengan menerapkan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang didapat di panti, akhirnya mendapat berbagai masalah, seperti sulitnya mendapat pekerjaan di dunia usaha karena adanya stigma dari masyarakat, kemudian sebagian eks warga binaan sosial belum bisa mengembangkan keterampilan yang sudah dimiliki karena masih membutuhkan modal untuk sewa lahan, dan membutuhkan kelengkapan peralatan keterampilan yang akan dikembangkan. Menurut eks warga binaan sosial paket stimulan usaha produktif berupa peralatan keterampilan yang diberikan PSBKPL belum lengkap, sehingga membutuhkan tambahan modal awal untuk melengkapi keperluan tersebut. Sejalan dengan temuan ini, maka perlu meneliti peran jejaring kerja dalam proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh PSBKPL Bekasi.

Peranan berasal dari kata peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat” Pengertian Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Triastuti (2012) mengutip pendapat Soekanto.S (2002), peranan mencakup 3 hal, yaitu : 1) peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; 2) peranan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; 3) peranan dikatakan juga perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jejaring kerja adalah proses aktif membangun dan mengelola hubungan-hubungan yang produktif. Jejaring kerja merupakan hubungan yang luas dan kokoh baik personal maupun organisasi. Selanjutnya dikatakan jejaring dalam organisasi merupakan suatu proses pemeliharaan, penumbuhan serta pengintegrasian kemampuan-kemampuan terpilih, bakat-bakat, hubungan dan partner dengan cara mengembangkan kemitraan yang kreatif dan strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi (Wayne E. Braker, 1984 dikutip oleh Sipagimbar (2013)).

Noval (2008) menjelaskan bahwa dalam prinsip manajemen moderen, suatu organisasi atau lembaga akan mampu memberikan hasil optimal apabila memiliki jejaring kerja (*networking*) yang kuat. Jejaring yang dimaksud adalah 2 (dua) kelompok atau lebih organisasi yang membentuk suatu komunitas atau lembaga atas dasar keselarasan peran dan fungsi, ataupun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh masing-masing organisasi tersebut.

Mencermati berbagai uraian tersebut, maka membangun jejaring kerja dalam menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial menjadi sangat penting baik secara individu maupun kelembagaan, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan yang diharapkan, membangun kerjasama dengan jejaring kerja dapat memperkuat strategi pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi di PSBKPL, dalam meningkatkan tarap hidup warga binaan sosial, karena akan dapat melengkapi kekurangan pada Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi sebagai pelaksana kegiatan.

Ilmu pekerjaan sosial tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Sukoco (n.d), bahwa tiga unsur

utama pelayanan sosial salah satunya adalah pelayanan sosial merupakan aktivitas profesi pekerjaan sosial bersama dengan profesi lain (bukan monopoli profesi pekerjaan sosial). Sejalan dengan pendapat tersebut, Standarisasi Panti Sosial (2004) memuat standar umum dan standar khusus panti sosial. Standar khusus memuat sejumlah kegiatan yang sistematis sebagai proses pelayanan profesional yang diberikan oleh pekerja sosial, psikolog, paramedis, pendidik dan tenaga profesional lainnya. Sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, dalam melaksanakan kegiatannya, panti sosial terikat dengan prinsip-prinsip dalam praktek pekerjaan sosial. Salah satu diantaranya disebutkan bahwa panti menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial secara terpadu antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya yang berkesinambungan.

Dalam Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sistim Panti (2007) dicantumkan salah satu kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis adalah Meningkatkan dan memperkuat peran masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan melibatkan seluruh unsur dan komponen masyarakat, termasuk dunia usaha, atas dasar swadaya dan kesetiakawanan sosial. sedangkan salah satu strategi yang harus dilaksanakan adalah kemitraan; melakukan kerjasama, kepedulian, kebersamaan, kesetaraan dan jaringan kerja untuk menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat/orsos dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial gepeng.

Rehabilitasi sosial sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 2009, diartikan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan

untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis ditujukan untuk : memulihkan fungsi sosial gelandangan dan pengemis, antara lain dapat dilihat dari gelandangan dan pengemis dapat merubah cara hidup dan cara mencari penghasilannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat; gelandangan dan pengemis mampu menjalankan fungsi dan peran sosialnya di masyarakat secara wajar (Standar Pelayanan Minimal, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gepeng, 2007).

Pelayanan sosial yang dimaksud menurut Romansyshyn yang dikutip oleh Fahrudin (2011) adalah sebagai usaha untuk mengembalikan, mempertahankan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga melalui (1) sumber-sumber sosial pendukung, (2) proses-proses untuk meningkatkan kemampuan individu dan keluarga dalam mengatasi stres dan tuntutan kehidupan sosial. Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Layanan sosial (*social services*) itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu program ataupun kegiatan yang didesain secara konkrit untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat, dapat ditujukan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas ataupun komunitas dalam suatu kesatuan. (Adi, 2013).

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peran jejaring kerja dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial di PSBK Pangudi Luhur Bekasi. Sejalan dengan hal ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbang saran kepada unit terkait, terutama panti sosial yang bersangkutan dan direktorat yang menaungi panti tersebut dalam perumusan kebijakan panti, terutama terkait dengan pengembangan kerjasama dengan jejaring kerja.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dilakukan di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur (selanjutnya disebut PSBKPL) Bekasi. Sejalan dengan hal ini, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang berarti peneliti fokus pada proses dan makna serta pemahaman yang didapat dari kata dan atau gambaran dengan menggunakan metode evaluasi dan pendekatan kualitatif.

Informan penelitian ditentukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa informan terpilih memahami proses pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial di panti. Informan dimaksud adalah pejabat struktural dan fungsional panti, instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial seperti, Dinas Sosial setempat, dunia usaha, dan eks warga binaan sosial sebagai kontrol informasi dan memperkaya informasi sebagai data penguat. Untuk mendapatkan data yang akurat maka pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD) dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, meliputi reduksi data, penyajian, penafsiran dan menyimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur.

1. Kelembagaan

Berdasarkan SK menteri Sosial Nomor 59/HUK/2009 tgl 23 juli 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di lingkungan Departemen Sosial RI, maka struktur organisasi PSBKPL Bekasi terdiri dari 1 (satu) kepala, 1 (satu) Subbag Tata Usaha dan 2 (dua) seksi yaitu Seksi Program dan Advokasi, Seksi Rehabilitasi Sosial dan kelompok jabatan fungsional. Masing-masing seksi bertanggung jawab langsung kepada kepala panti.

Tujuan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan PSBKPL Bekasi, adalah untuk memulihkan fungsi sosial gelandangan dan pengemis, antara lain dapat dilihat dari gelandangan dan pengemis mampu merubah cara hidup dan cara mencari penghasilannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat; gelandangan dan pengemis dapat dijangkau dan mau mengikuti program pelayanan dan rehabilitasi sosial; gelandangan dan pengemis mampu menjalankan fungsi dan peran sosialnya di masyarakat secara wajar (Dit. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Ditjen. Yanrehsos, 2007).

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai PSBKPL Bekasi pada tahun 2014 adalah 70 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 53 orang (75,71%), dan tenaga honorer 17 orang (24,28%), dengan tingkat pendidikan Sarjana kesejahteraan sosial tujuh orang, Sarjana non kesejahteraan sosial lima orang, sarjana muda kesejahteraan sosial dua orang, sarjana muda non kesejahteraan sosial delapan orang, SLTA jurusan kesejahteraan

sosial empat orang, SLTA non kesejahteraan sosial 27 orang SLTP satu orang dan sekolah dasar satu orang. Sedangkan menurut jabatannya terdapat 4 (empat) orang pejabat struktural, 15 orang fungsional pekerja sosial, arsiparis 1 (satu) orang, psikolog 2 (dua) orang, dokter umum dan dokter gigi masing-masing 1 (satu) orang, perawat 3 (tiga) orang, instruktur 10 orang, pranata komputer 1 (satu) orang, empat orang Satpam, tujuh orang tukang kebun, supir satu orang dan pramu kantor dua orang serta staf pendukung lainnya.

Perbandingan antara pekerja sosial yang hanya 15 orang dengan warga binaan sosial masih belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan, yaitu 1 (satu) berbanding 15 sampai 16, idealnya 1 (satu) berbanding 9 (sembilan) sampai 10 (standarisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial PSBK). Sedangkan berdasarkan Standarisasi Panti, perbandingan antara pekerja sosial dan warga binaan sosial adalah 1 (satu) : 5 (lima) (Kep.Mensos RI No. 50/HUK/2004). Menurut Kepala PSBKPL Bekasi: “saat ini pegawai baru sudah diarahkan untuk menjadi pekerja sosial, sehingga jumlah yang dibutuhkan dapat terpenuhi.”

Tingkat pendidikan pekerja sosial adalah setingkat SMA sembilan orang, (2 orang diantaranya adalah SMPS), D3 (kesejahteraan sosial) satu orang, D4 (kesejahteraan sosial) empat orang dan sarjana sosial satu orang. Hanya sebagian kecil saja yang sudah mengikuti pendidikan/pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan yang berbasis kesejahteraan sosial. Sebagian besar telah memiliki sertifikat pekerja sosial fungsional sesuai dengan jenjang fungsionalnya. Menurut pekerja sosial,” sertifikasi ini belum memuat kebutuhan pelayanan

yang dilaksanakan pekerja sosial, karena sertifikasi hanya menetapkan bahwa peksos yang bersangkutan adalah fungsional pekerja sosial pada tingkat yang ditetapkan. Sedangkan pada pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan membutuhkan keahlian sesuai dengan permasalahan yang ditangani, seperti pekerja sosial anak, pekerja sosial remaja, pekerja sosial Lanjut Usia dsb”.

Selain pekerja sosial fungsional, tenaga lain yang berperan dalam proses rehabilitasi di PSBKPL Bekasi adalah instruktur keterampilan. Sebagian instruktur tidak memiliki sertifikat yang terkait dengan ilmu keterampilan yang diberikan kepada warga binaan sosial. Meskipun demikian mereka telah mendapatkan ilmu keterampilan langsung dari lembaga praktek keterampilan, atau belajar sendiri secara otodidak. Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, “para instruktur cukup menguasai dan mahir dalam jenis keterampilan yang diberikan kepada warga binaan sosial. Mereka juga bukan termasuk tenaga honor panti”.

3. Sarana Dan Prasarana.

PSBKPL memiliki lahan seluas 51.616 m², terdiri dari 4.204 m² untuk bangunan (bangunan kantor, ruang keterampilan, aula, taman penitipan anak, poliklinik, MCK, Ruang isolasi dan pondok/asrama warga binaan sosial dan sarana pendukung pondok dll) dan 3.000 m² untuk lahan percobaan pertanian. Ruang kantor yang dimiliki adalah ruang kepala panti, ruang Tata Usaha, ruang bendahara, ruang seksi Program dan Advokasi Sosial, ruang seksi Rehabilitasi Sosial, ruang pekerja sosial, ruang psikologi, ruang bendahara, ruang dokter gigi. Selain itu PSBKPL juga memiliki ruang untuk menunjang kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan, seperti ruang rapat, ruang tamu pekerja sosial,

ruang tamu Taman Penitipan Anak, ruang tamu kelas, ruang tamu poliklinik, ruang koperasi. Selain ruangan yang dimiliki, PSBKPL juga didukung oleh berbagai jenis sarana peralatan kantor yang cukup lengkap, baik sarana kerja maupun sarana transportasi, namun diakui masih dalam jumlah yang terbatas terutama computer dan sarana transportasi. PSBKPL memiliki tiga unit kendaraan roda empat dan empat unit kendaraan roda dua.

Sarana pelayanan dan rehabilitasi; PSBKPL Bekasi memiliki 31 asrama/pondok untuk tempat tinggal warga binaan sosial, masing masing pondok terdiri dari lima pintu/rumah, masing-masing pintu/rumah terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu dan satu ruang dapur (sebagian tidak memiliki ruang dapur). Satu pintu dihuni oleh satu keluarga (ibu, bapak, anak usia sekolah) sedangkan keluarga yang memiliki anak remaja bergabung dengan remaja lain dalam satu rumah/pintu. Untuk bimbingan keterampilan PSBKPL Bekasi memiliki sembilan unit ruang keterampilan, ruang pendidikan, ruang TPA, aula, sarana kesenian, dua unit ruang rehabilitasi dan satu unit Musholla. Panti ini juga dilengkapi dengan sarana olah raga, sarana kesenian dan satu unit *Guest House*. Kemudian untuk pelayanan kesehatan, terdapat poliklinik dan ruang rawat inap, sedangkan untuk kesejahteraan pegawai, PSBKPL memiliki rumah dinas, satu unit tipe C, 14 unit tipe D dan 19 unit tipe E.

4. Gambaran Warga Binaan Sosial (WBS)

Pada tahun 2014, warga binaan sosial (selanjutnya disebut WBS) berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung dan provinsi sumatera utara.

Jumlah warga binaan sosial per angkatan (6 bulan) adalah 300 orang yang terdiri dari balita, anak usia sekolah, remaja dan orang tua serta lanjut usia yang masih produktif. Mereka ada yang datang dengan status keluarga (istri, suami, anak) maupun sendiri (buang/gadis, janda/duda).

Tingkat pendidikan WBS yang dewasa bervariasi mulai dari SD sampai tingkat SMA bahkan ada yang tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah. Sebagian besar warga binaan sosial di PSBKPL Bekasi berasal dari keluarga atau masyarakat yang rawan menjadi gelandangan dan pengemis. Menurut pekerja sosial hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bertambah banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis di jalanan, sementara yang sudah terjun di jalanan, juga dilakukan agar mereka tidak lagi hidup sebagai gelandangan dan pengemis.

Untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di PSBKPL, calon warga binaan sosial perorangan maupun keluarga harus memenuhi persyaratan yang ada yaitu, tidak memiliki penyakit menular/kronis; tidak cacat fisik/mental; tidak sedang berurusan dengan penegak hukum; bersedia mengikuti program pelayanan panti; usia produktif (secara fisik dan mental mampu dilatih).

Pelaksanaan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial.

Mengacu pada. Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sistim Panti (2006), PSBKPL melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap warga binaan sosial seperti berikut.

1. Pendekatan awal

Pendekatan awal dilakukan melalui sosialisasi program, orientasi dan konsultasi,

identifikasi masalah, motivasi dan seleksi penerimaan. Sosialisasi program dilakukan melalui Dinas Sosial Tk. II. Selain itu pekerja sosial dan seksi PAS terjun langsung ke kantong-kantong gelandangan dan pengemis serta orang terlantar, termasuk yang rentan gepeng yang tersebar di pusat-pusat kota seperti pasar tradisional, stasiun kereta api, terminal bus, kolong jembatan, emperan toko.

Menurut Peksos pada tahap ini PSBKPL mensosialisasikan programnya kepada Dinas Sosial setempat dan instansi terkait, untuk mendapatkan dukungan dan peran serta dalam pelaksanaan program. Pada kesempatan ini petugas panti sekaligus melakukan orientasi dan konsultasi tentang wilayah-wilayah yang menjadi kantong calon warga binaan sosial untuk menumbuhkan peran serta aktif dari instansi terkait dan para tokoh masyarakat. Pada saat yang sama pekerja sosial melakukan identifikasi masalah terhadap calon WBS serta potensi lingkungan yang mendukung proses pelayanan dan rehabilitasi warga binaan sosial ketika kembali dari panti, baik potensi alam, sumber daya manusia dan nilai-nilai setempat. Selanjutnya seleksi dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial setempat dan gelandangan dan pengemis yang sudah dimotivasi oleh pekerja sosial untuk mendapatkan calon warga binaan sosial.

2. Penerimaan dan pengasramaan.

Pada tahap penerimaan dilakukan registrasi, studi kasus dan penempatan dalam program rehabilitasi sosial. Registrasi dilakukan oleh pekerja sosial dan psikolog, untuk memastikan calon WBS memenuhi syarat untuk diterima sebagai warga binaan sosial. Sebelumnya calon WBS diperiksa kesehatannya di poliklinik

PSBKPL, untuk memastikan tidak memiliki penyakit menular atau penyakit lainnya yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi. Menurut peksos, pada kesempatan ini pekerja sosial dan psikolog berusaha menggali informasi dan mempelajari latar belakang warga binaan sosial, riwayat permasalahan yang dihadapi warga binaan sosial, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan warga binaan sosial. Pekerja sosial dan psikolog menggali informasi dari WBS dengan cara wawancara. Hasil wawancara akan dijadikan data dasar untuk penempatan dalam pondok dan dalam program rehabilitasi sosial sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki masing-masing WBS dan tingkat pendidikan, serta disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PSBKPL. WBS yang berasal dari satu daerah, tidak ditempatkan dalam satu pondok.

3. Asesmen (Pengungkapan dan Pemahaman Masalah)

Assesmen dapat dilakukan sepanjang WBS menerima bimbingan dan rehabilitasi sosial di PSBKPL Bekasi. Asesmen yang dilakukan pada awal penerimaan untuk menelusuri, menggali data WBS, faktor-faktor penyebab masalahnya, tanggapannya serta kekuatan-kekuatannya dalam rangka membantu dirinya sendiri. Aspek-aspek dalam asesmen meliputi fisik, mental spiriitual, sosial dan keterampilan. Menurut kepala panti, asesmen juga dilakukan apabila WBS bermasalah di panti, baik masalah dalam keluarganya, maupun dengan tetangga sesama warga binaan sosial. Assesmen dilakukan oleh pekerja sosial, sedangkan penyelesaian masalah dilakukan oleh pembimbing pondok. Menurut peksos, jika melalui pembimbing belum terselesaikan, maka pembimbing

dan peksos bekerjasama menyelesaikan masalah warga binaan sosial. Jika belum terselesaikan juga maka akan diadakan *Case Conference* atau pembahasan kasus, yang melibatkan pekerja sosial, seksi rehabilitasi sosial, psikolog, pembimbing agama dan medis. Untuk mengupayakan penyelesaian masalah WBS, tidak jarang dilakukan home visit, untuk mengetahui lebih jauh kondisi keluarga sebelum masuk ke panti.

4. Pelaksanaan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial.

Pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis di PSBKPL mencakup :

a. Bimbingan sosial

Bimbingan yang ditujukan kearah tatanan kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat. Bimbingan sosial dilakukan melalui teori dan praktek hidup berteman, berrelasi dan bersosialisasi; hidup bermasyarakat, bergotong royong, bertanggung jawab dan bertoleran; hidup tertib dan berperilaku sesuai aturan dan tata nilai yang berlaku di masyarakat; hidup selalu optimis, bekerja keras dan percaya diri; bimbingan pengetahuan dasar; kesehatan, keluarga berencana; kewirausahaan dan keteraturan bermasyarakat dan taat hukum. Menurut peksos, teori bimbingan sosial dilakukan secara klasikal, Warga Binaan Sosial dikelompokkan berdasarkan latar belakang pendidikan (SD, SMP, SMA). Kemudian diskusi kelompok dan dinamika kelompok, serta terapi komuniti yang dilakukan melalui pertemuan pagi, bimbingan kelompok, curahan hati/pengalaman hidup.

b. Bimbingan fisik dan kesehatan.

Bimbingan fisik dan kesehatan merupakan bimbingan untuk pengenalan dan praktek cara-cara hidup sehat secara teratur dan disiplin agar kondisi fisik selalu dalam keadaan sehat. Pelayanan dan kegiatan yang mendukung bimbingan fisik dan kesehatan melalui pelayanan menu makanan yang diberikan dalam bentuk natura 5 (lima) hari sekali. Kemudian bimbingan fisik berupa Pelajaran Baris Berbaris dan kedisiplinan dibimbing oleh kepolisian, olah raga, *outbound*, kebersihan ketertiban dan keindahan (K3) dan senam kesegaran jasmani (SKJ) dibimbing oleh peksos dan petugas lainnya dari PSBKPL. Selain itu bimbingan kesehatan dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan di poliklinik milik panti, bimbingan hidup sehat, kesehatan reproduksi, penyuluhan HIV/AIDS dan pelayanan Keluarga Berencana. Sedangkan khusus untuk ibu hamil diadakan pemeriksaan kehamilan dan imunisasi. Bagi anak balita selain pemeriksaan kesehatan secara rutin, juga diberikan imunisasi sesuai kebutuhan anak balita serta pemberian vitamin A. Warga Binaan Sosial yang sakit yang tidak bisa diobati di poliklinik panti, dirujuk ke rumah sakit Umum Bekasi, atau ke rumah sakit terdekat yang telah diadakan kerjasama seperti Klinik, Rumah Bersalin/Bidan dll.

Dalam pemeriksaan kesehatan, kadangkala terdeteksi penyakit yang berat yang diderita oleh warga binaan sosial yang tidak terdeteksi saat penerimaan seperti ini dirujuk ke panti lain yang sesuai dengan permasalahannya untuk penanganan lebih lanjut.

c. Bimbingan Mental Spiritual

Bimbingan mental spiritual ditujukan untuk memahami diri sendiri dan orang

lain melalui bimbingan keagamaan, etika/budi pekerti dan disiplin diri. Bimbingan spiritual dilakukan melalui ceramah agama dua kali/minggu, pengajian satu kali seminggu, belajar membaca Al Qur'an satu kali seminggu. Bimbingan mental diberikan oleh pekerja sosial yang dianggap mampu dalam bimbingan agama.

d. Bimbingan keterampilan kerja

Bimbingan keterampilan kerja ditujukan agar warga binaan sosial terampil dibidangnya sehingga memungkinkan mereka mampu memperoleh pendapatan yang layak sebagai hasil pendayagunaan keterampilan kerja yang dimiliki. Masing-masing jenis keterampilan di bimbing oleh seorang instruktur yang didampingi oleh seorang pekerja sosial. Menurut pekerja sosial, dalam bimbingan keterampilan pekerja sosial bertugas memantau dan memotivasi warga binaan sosial agar setiap bimbingan dilakukan dengan tekun. Keterampilan yang diberikan sesuai dengan minat dan bakat WBS yang mencakup pertukangan kayu, bengkel las, olahan pangan dan pembuatan tahu/tempe, sablon, tata rias, montir mobil, montir motor, servis elektro, menjahit, budi daya perikanan dan pertanian.

5. Resosialisasi

Resosialisasi merupakan serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah yaitu di satu pihak untuk mempersiapkan WBS agar dapat berintegrasi penuh ke dalam kehidupan dan kehidupan masyarakat secara normatif, dan di satu pihak lagi untuk mempersiapkan masyarakat khususnya masyarakat daerah asal atau lokasi penempatan kerja WBS agar mereka dapat menerima, memperlakukan dan mengajak serta untuk berintegrasi dengan kegiatan masyarakat. Resosialisasi dilakukan satu

bulan atau dua bulan sebelum terminasi atau pemulangan WBS. PSBKPL melakukan kegiatan resosialisasi ke lembaga pengirim/Dinas Sosial untuk memberitahukan pemulangan WBS yang dikirim oleh lembaga/Dinas Sosial setempat, karena telah selesainya pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan PSBKPL Bekasi, dan kemudian menjalin kerjasama dalam melaksanakan binjutan, dengan harapan instansi terkait serta masyarakat dapat memfasilitasi eks WBS dalam mengembangkan keterampilan yang sudah di dapat dari PSBKPL Bekasi.

Resosialisasi warga binaan sosial dilakukan melalui kegiatan Praktek Belajar Kerja (PBK) selama 1 (satu) bulan. PBK dilakukan melalui kerja sama dengan dunia usaha sesuai dengan jenis keterampilan WBS. Beberapa jenis keterampilan tertentu, seperti olah pangan, PBK dilakukan dengan mengolah makanan di panti, kemudian menjualnya sendiri ke masyarakat sekitar.

Pada akhir pelayanan dan rehabilitasi sosial sebelum pemulangan, WBS diberikan paket kerja sesuai dengan jenis keterampilan. Paket ini merupakan bantuan stimulan usaha produktif berupa bahan dan peralatan kerja untuk melaksanakan praktek keterampilan yang sudah diberikan, bertujuan agar mereka memiliki mata pencaharian dan berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut Kasie Rehabilitasi Sosial, paket diberikan secara kelompok dan perorangan, sesuai dengan jenis keterampilan yang diikuti.

6. Penyaluran.

Penyaluran warga binaan sosial diwujudkan dalam bentuk pengembalian ke masyarakat, menyalurkan ke tempat kerja, dan menyalurkan sebagai peserta

transmigrasi. Penyaluran dilakukan setelah selesai masa bimbingan dan rehabilitasi. Hasil FGD diketahui bahwa, secara khusus penyaluran ke tempat kerja pada saat ini belum sepenuhnya dapat dilakukan, oleh karena kepercayaan dunia usaha terhadap sebagian eks WBS masih rendah. Dunia usaha pernah mempekerjakan eks WBS namun banyak keluhan yang dihadapinya seperti keterampilan eks WBS yang masih kurang, sikap terhadap pekerjaan juga masih kurang, masih malas-malasan, setelah beberapa bulan bekerja sering meninggalkan pekerjaan tanpa pamit dan membawa beberapa peralatan kerja. Menurut pekerja sosial sikap eks WBS masih sulit dikendalikan ketika sudah kembali ke masyarakat. Kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemilik usaha sering disalahgunakan dengan membawa barang-barang dari tempat usahanya, sehingga berimbas kepada eks warga binaan sosial yang lain yang benar-benar mau memanfaatkan keterampilan yang dimiliki dan benar-benar mau merubah hidupnya. Sementara untuk mencari sendiri pekerjaan dengan modal keterampilan yang dimiliki hasil bimbingan dari PSBKPL, eks WBS merasa kesulitan, walaupun sudah menunjukkan sertifikat yang diberikan oleh PSBKPL. Menurut Eks WBS sertifikat yang didapat dari PSBKPL Bekasi belum diakui.

Kemudian dari hasil FGD juga diketahui bahwa, penyaluran juga dilakukan dengan mengikutkan WBS dalam program transmigrasi ke daerah Kalimantan Tengah, Gorontalo, Morotai dan Maluku Utara.

7. Bimbingan lanjut, Evaluasi dan Terminasi

Merujuk pada Standart Pelayanan Minimal dan Pedoman Teknis, bimbingan lanjut merupakan serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada WBS dan

masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemandirian WBS dalam penghidupan serta kehidupan yang layak.

Kegiatan yang dilakukan PSBKPL dalam binjut adalah melihat kondisi eks WBS, pemanfaatan paket stimulan usaha produktif yang diberikan, pekerjaan yang ditekuni, kondisi ekonomi dan tempat tinggal. Sejak tahun 2013 selain kegiatan tersebut, PSBKPL juga memberikan bantuan modal pengembangan usaha bagi eks WBS yang mampu mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil bimbingan lanjut, eks WBS yang terpilih membuat proposal yang ditujukan kepada PSBKPL untuk mendapatkan bantuan modal pengembangan usaha yang disebut dengan Jadup (jaminan hidup), pada tahun 2014 jadub diberikan sebesar Rp. 4. 500.000,- .

Sedangkan evaluasi dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan proses rehabilitasi, untuk memastikan apakah proses pelayanan dan rehabilitasi secara keseluruhan dapat dilakukan dan berjalan dengan baik. Kemudian terminasi atau pengahiran pelayanan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan, apakah Warga Binaan Sosial telah dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan mampu menjadi warga masyarakat yang baik. Pengahiran pelayanan sedapat mungkin tidak menimbulkan konflik psikologis yang mengganggu WBS karena belum mampu mandiri. Menurut peksos binjut tidak bisa dilakukan secara maksimal karena terbatasnya anggaran. Binjut hanya dilakukan untuk lokasi yang terdekat saja.

8. Kegiatan Penunjang:

Selain kegiatan yang dilakukan berdasarkan panduan yang ada, PSBKPL

Bekasi juga melaksanakan kegiatan yang menunjang keberhasilan program kegiatan pokok, seperti :

- a. Pernikahan masal, ditujukan bagi WBS yang belum memiliki buku nikah/akta nikah, dan bagi WBS yang kebetulan menemukan jodohnya di panti.
- b. Khitanan masal untuk anak dari keluarga warga binaan sosial
- c. Widyawisata yang dilakukan setiap angkatan/ setiap 6 bulan sekali.
- d. Mengikuti Bazaar/pameran, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang visi misi dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi serta hasil-hasil shelter workshop dan produksi hasil warga binaan sosial.
- e. Kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dilakukan oleh pegawai PSBKPL, untuk membantu penanganan permasalahan sosial secara cepat, tepat dan terukur, terutama permasalahan gelandangan dan pengemis dan orang terlantar yang belum tertangani oleh dinas atau instansi terkait, sedangkan permasalahan sosial di luar gelandangan dan pengemis hanya sebatas mediator ke lembaga kesejahteraan lainnya

Jejaring Kerja dan Perannya Dalam Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur (PSBKPL) Bekasi

Meskipun era globalisasi semua sarana prasana dapat digunakan dengan metode yang demikian canggih, namun dalam melaksanakan suatu kegiatan, akan dapat mencapai hasil yang optimal jika dilaksanakan secara bersama antar unit/instansi terkait, perorangan maupun lembaga. Demikian halnya dengan PSBKPL Bekasi, untuk menghasilkan eks WBS yang mampu memiliki posisi tawar, maka merupakan suatu keharusan menjalin kerjasama dengan jejaring kerja (*networking*) yang potensial untuk

bersama-sama melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi. Panti membutuhkan jejaring kerja (*networking*) untuk menjadikan warga binaan sosial memiliki posisi tawar atau mandiri.

Beberapa lembaga baik pemerintah maupun swasta yang berperan sebagai jejaring kerja PSBKPL Bekasi, sesuai dengan tahap-tahap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam tulisan ini keterlibatan jejaring kerja dibagi dalam tiga tahap kegiatan yaitu pada tahap pra rehabilitasi (Pra Intervensi), tahap Rehabilitasi (Intervensi) dan pasca rehabilitasi (pasca Intervensi):

1. Pra Rehabilitasi (Pra Intervensi).

Kegiatan yang dilaksanakan pada pra rehabilitasi (pra intervensi) adalah pendekatan awal, penerimaan, penelaahan dan pengungkapan dan pemahaman masalah (asesmen) dan rencana intervensi/penempatan ke dalam program. Sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut, pada pra intervensi PSBKPL Bekasi menjaring kerjasama dengan beberapa instansi/lembaga dan disiplin ilmu sebagai berikut :

a. Instansi sosial Tk II (Kabupaten/ Kota) :

PSBKPL Bekasi bekerjasama dengan Instansi Sosial Tk II dalam perikrutan calon WBS. Pihak instansi sosial Tk. II yang merupakan instansi pengirim WBS mendampingi petugas PSBKPL Bekasi dan bersama-sama melaksanakan sosialisasi program dan menyiapkan data-data terkait dengan calon WBS. Menurut pekerja sosial hal ini merupakan bagian dari koordinasi dengan pihak instansi sosial Tk. II yang dilaksanakan setiap periode pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis atau dua kali setahun. Menurut peksos masalah yang terkait dengan kegiatan ini adalah data yang diberikan oleh instansi sosial sering tidak akurat, baik jumlah maupun keberadaan

atau alamat calon WBS. Hal ini juga terungkap pada saat fgd, peserta fgd dari instansi sosial mengakui hal ini karena kurangnya petugas dan sarana lainnya untuk melakukan pendataan calon WBS. PSBKPL mengharapkan pihak instansi sosial Tk. II selalu melakukan updating data PMKS Gepeng yang ada di wilayahnya. Kemudian instansi Sosial juga memberikan surat rekomendasi bagi calon WBS untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi di PSBKPL Bekasi.

b. Polsek Bekasi Timur

Polsek Bekasi Timur merupakan salah satu instansi yang bekerjasama dengan PSBKPL Bekasi, terutama dalam hal perikrutan calon WBS dan keamanan. PSBKPL melakukan sosialisasi tentang kegiatannya kepada masyarakat termasuk pihak kepolisian. Berdasarkan hal ini PSBKPL secara tidak langsung membangun kerjasama dengan kepolisian dalam hal perikrutan calon WBS. Seperti yang dikatakan informan kepolisian bahwa, pihak kepolisian merujuk orang terlantar dan PMKS lainnya ke PSBKPL berdasarkan informasi atau sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi ini telah dilakukan sejak lama, berdasarkan hal tersebut setiap tahun bahkan setiap saat ada orang terlantar yang sesuai dengan permasalahannya, maka mereka akan merujuk ke PSBKPL Bekasi, walaupun tidak ada pemberitahuan tentang pelaksanaan program dari PSBKPL Bekasi. Informan kepolisian mengatakan hal ini sudah terbiasa, sehingga tidak perlu pemberitahuan setiap periode kegiatan PSBKPL, dan ini juga merupakan salah satu dari tugas kepolisian.

Menurut peksos, orang terlantar yang dirujuk kepolisian sebagian besar

mengalami masalah psikotik, sehingga pihak PSBKPL ada kendala menerima rujukan tersebut, karena PSBKPL memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis yang tidak bermasalah dengan psikotik, sehingga PSBKPL harus merujuk lagi calon WBS tersebut ke panti lain yang sesuai dengan permasalahan calon WBS tersebut. Selain bermasalah dengan psikotik, calon WBS yang sering dirujuk kepolisian adalah anak terlantar dan penyandang disabilitas.

c. Panti Sosial/ Yayasan

Panti sosial/yayasan merupakan salah satu jejaring kerja yang bekerjasama pada tahap penempatan WBS dalam program rehabilitasi sosial. PSBKPL melakukan rujukan ke panti sosial lain bagi calon WBS yang tidak memenuhi syarat. PSBKPL mengirim surat permohonan rujukan ke panti yang dituju, seperti PSBR Bambuapus, Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Phala Martha Sukabumi, Yayasan Galuh Bekasi, Trauma Centre Bambuapus, PSBRW Melati Bambuapus. Menurut peksos setiap periode pelaksanaan rehabilitasi sosial selalu ada calon WBS yang tidak memenuhi syarat, namun tidak semua dirujuk ke panti sosial lain. Peksos mengatakan calon WBS yang dirujuk ke panti sosial lain sesuai permasalahan calon WBS.

d. Dinas Kesehatan/ RSUD Bekasi

PSBKPL menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan melalui RSUD Bekasi dalam rangka pengungkapan dan pemahaman masalah (asassmen) yang dilakukan oleh peksos, PSBKPL Bekasi mengajukan surat permohonan rekomendasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi calon WBS yang menderita sakit yang harus dirujuk ke RSUD, dan bagi calon WBS yang

membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan tidak mengidap penyakit menular, sehingga bisa diterima sebagai WBS di PSBKPL Bekasi. Informan dari RSUD mengatakan bahwa RSUD selalu memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan dari PSBKPL Bekasi, walaupun tidak ada perjanjian kerjasama/MoU, karena sudah terbiasa setiap tahun melakukan pelayanan kesehatan bagi WBS PSBKPL Bekasi, selain itu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas merupakan tugas dan fungsi RSUD, apalagi WBS dari PSBKPL Bekasi yang notabene adalah orang-orang terlantar atau orang yang tidak mampu, sehingga surat perjanjian kerjasama dianggap tidak terlalu diutamakan. namun menurut peksos kalau ada perjanjian kerjasama/MoU akan lebih bagus lagi karena pihak RSUD akan lebih aktif memberikan pelayanan kepada WBS, bahkan mungkin akan datang ke PSBKPL Bekasi untuk memberikan pelayanan kesehatan.

2. Rehabilitasi /Intervensi

a. Polsek Kota Bekasi Timur.

PSBKPL bekerjasama dengan Polsek Bekasi Timur dalam memberikan pengarahan dan bimbingan fisik dalam bentuk Pelajaran Baris Berbaris (PBB) dan kedisiplinan. Peksos mengatakan pada permulaan pelaksanaan kegiatan, dilakukan PBB dan kedisiplinan bagi WBS remaja dan dewasa dibimbing oleh petugas dari polisi sektor Bekasi Timur. Informan kepolisian mengatakan, kegiatan PBB ini dilakukan pada setiap periode pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi bagi WBS PSBKPL Bekasi, dan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan kepolisian sektor Bekasi Timur berdasarkan surat permintaan dari PSBKPL Bekasi. Kemudian dikatakan

bahwa belum pernah ada perjanjian kerjasama antara PSBKPL Bekasi dengan kepolisian dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun menurut informan melakukan perjanjian kerjasama akan lebih baik karena akan memudahkan pelaksanaan kegiatannya. Karena akan lebih detail apa saja yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, artinya hak dan kewajiban masing-masing akan lebih jelas dan komunikasi tidak saja datang dari PSBKPL Bekasi tetapi bisa juga dari pihak kepolisian. Selama ini yang aktif melakukan komunikasi hanya PSBKPL Bekasi.

b. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Timur.

PSBKPL Bekasi bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan masal bagi WBS yang akan menikah di PSBKPL Bekasi dan bagi WBS yang sudah menikah tetapi tidak memiliki surat nikah. Pada saat fgd terungkap bahwa berdasarkan surat permintaan untuk melaksanakan pernikahan bagi WBS PSBKPL Bekasi, pihak KUA mengirimkan petugas/penghulu untuk melaksanakan pernikahan masal tersebut pada waktu yang sudah disepakati bersama. Peksos mengatakan petugas KUA yang datang ke PSBKPL 3-5 orang, karena yang akan dinikahkan dalam jumlah banyak, sampai 20 pasang.

c. Dinas Kesehatan / RSUD Kota Bekasi

PSBKPL Bekasi melakukan rujukan pelayanan kesehatan lanjutan bagi WBS yang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan, apabila tidak bisa diobati di Poliklinik PSBK atau Puskesmas. Menurut peksos ketika melakukan rujukan ke RSUD, tidak dilakukan surat menyurat atau perjanjian kerjasama. Pelayanan kesehatan bagi WBS oleh RSUD merupakan lanjutan

pelayanan yang diberikan pada tahap pra intervensi. Hal seperti ini sudah terbiasa dilakukan sehingga tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan atau pengobatan bagi WBS. Informan RSUD mengatakan bahwa pelayanan kesehatan terhadap WBS PSBKPL Bekasi yang merupakan orang tidak mampu merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan RSUD. Pihak RSUD hanya membutuhkan surat keterangan dari Dinas Sosial dan PSBKPL yang menyatakan bahwa mereka benar-benar Warga Binaan Sosial dari PSBKPL Bekasi, sehingga tidak menyulitkan dalam pelayanan kesehatan, karena identitas WBS pada umumnya bukan dari wilayah Bekasi.

d. Lembaga Pendidikan

WBS PSBKPL Bekasi adalah merupakan keluarga yang terdiri dari balita, anak, remaja, orang dewasa dan lanjut usia. Bagi anak usia sekolah ketika orangtuanya mengikuti kegiatan di PSBKPL Bekasi sudah jelas akan berhenti sementara dari sekolahnya. Hal ini disikapi oleh PSBKPL bahwa WBS anak usia sekolah, harus terus sekolah dengan cara titip belajar di sekolah lain. Sekolah yang menjadi jejaring kerja PSBKPL Bekasi adalah :

SDN 15 Nusa Indah Kota Bekasi Timur

PSBKPL Bekasi menitipkan WBS usia SD di SDN 15 Nusa Indah Kota Bekasi Timur untuk melanjutkan belajar dengan sebutan “titip belajar”. Hasil fgd terungkap bahwa, pihak sekolah menerima siswa titip belajar dari PSBKPL Bekasi, hal ini terkait dengan wajib belajar sembilan tahun sehingga setiap sekolah mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas tersebut. Informan sekolah mengatakan, mereka menerima siswa dari PSBKPL Bekasi

untuk titip belajar selama 3-4 bulan. Mereka hanya dititipkan belajar bersama siswa yang lain. Semua kebutuhan dan keperluan sekolah dipenuhi oleh PSBKPL. Menurut informan jika memungkinkan perjanjian kerjasama perlu dilakukan sehingga ada kejelasan tugas masing-masing antara PSBKPL Bekasi dan pihak sekolah, seperti pihak PSBKPL bertanggung jawab terhadap bimbingan siswa di rumah, kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi PSBKPL Bekasi dan mana saja yang harus dipenuhi oleh sekolah.

SMP Amal Ma'ruf Bekasi Timur

Bagi warga binaan sosial usia SMP maka PSBKPL Bekasi berkoordinasi dengan SMP Amal Ma'ruf. Seperti halnya dengan SDN 15, PSBKPL titip belajar bagi warga binaan sosial usia sekolah SMP di SMP Swasta Amal Ma'ruf. Peksos mengatakan warga binaan sosial usia sekolah dasar lebih banyak dari usia SMP. Kebutuhan sekolah untuk siswa SMP dipenuhi oleh PSBK. Pihak sekolah mengatakan mereka menerima siswa titip belajar dari PSBK 2-4 orang setahun selama 4-5 bulan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

SMK Karya Guna Bekasi merupakan salah satu SMK yang menjadi jejaring kerja PSBKPL Bekasi. Siswa SMK melaksanakan PKL di PSBKPL. Menurut bagian TU, siswa SMK melaksanakan PKL selama 1-3 bulan, mereka banyak membantu di bagian administrasi.

Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi yang menjadi jejaring kerja PSBK adalah STKS Bandung, UNJ, UHAMKA dan UIN. Mahasiswa terkait melakukan PKL di PSBKPL. Mahasiswa menjadikan PSBK sebagai laboratoriumnya. Mereka melakukan kegiatan bimbingan terhadap warga

binaan sosial bersama sama dengan peksos dan melaksanakan pendampingan WBS pada saat pelaksanaan bimbingan keterampilan maupun bimbingan sosial.

e. Dunia Usaha.

Dunia usaha yang menjadi jejaring kerja PSBKPL Bekasi adalah bengkel motor, bengkel mobil, My Salon, Tomi Salon, usaha pembuatan tempe tahu, usaha sablon, konveksi. PSBK mengirim surat permohonan kepada dunia usaha untuk tempat warga binaan sosial melaksanakan praktek belajar kerja (PBK). Harapan PSBKPL dunia usaha dapat ikut membimbing WBS dalam dunia usaha. Menurut informan dari dunia usaha, mereka menerima WBS untuk melakukan praktek belajar kerja sambil memberi arahan dan membimbing ke arah usaha mandiri. Namun menurut informan lain, keterampilan yang dimiliki WBS masih sangat dangkal untuk dapat bekerja mandiri, mereka masih butuh bimbingan lanjutan untuk mampu mendirikan usaha mandiri. Belum ada perjanjian kerjasama yang tertulis sehingga dunia usaha terlihat belum maksimal melakukan bimbingan bagi WBS yang melakukan PBK di tempat usahanya. Hal ini terlihat dari ungkapan salah satu informan dunia usaha yang mengatakan bahwa dia menerima WBS untuk melaksanakan PBK hanya mempraktekkan apa yang sudah mereka dapat di PSBKPL, pihak dunia usaha tidak berkewajiban untuk membimbing WBS yang sedang PBK, dunia usaha hanya menyediakan tempat bagi WBS untuk melaksanakan PBK sesuai dengan permintaan dari PSBKPL Bekasi.

3. Pasca Intervensi

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi.

Dinas Tenakertrans merupakan jejaring

kerja PSBKPL Bekasi dalam penyaluran eks WBS sebagai transmigrasi. PSBKPL mengikutsertakan WBS sebagai transmigrasi, yang merupakan program dari Disnakertrans. Menurut peksos tujuan daerah transmigrasi WBS adalah kalimantan tengah, sulawesi, gorontalo, morotai dan maluku utara. Informan Disnakertrans mengatakan transmigrasi merupakan salah satu program Disnakertrans, sehingga dengan adanya informasi dari PSBKPL adanya WBS yang ingin ikut bertransmigrasi, maka Disnakertrans merasa terbantu untuk merekrut warga calon transmigrasi. Kemudian PSBKPL memintak bantuan kepada disnakertrans untuk membantu proses pembuatan syarat transmigrasi. Menurut peksos jika ada warga binaan sosial yang ingin ikut bertransmigrasi, PSBKPL Bekasi berkoordinasi dengan Disnakertrans Kota Bekasi. Kemudian petugas Disnakertrans datang ke PSBKPL untuk membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan. Belum ada perjanjian kerjasama/MoU dengan Disnakertrans.

b. Dinas sosial Tk.II.

PSBKPL Bekasi berkoordinasi dengan Dinas Sosial sebagai lembaga pengirim, dalam rangka rencana pemulangan warga binaan sosial. Melalui koordinasi ini diharapkan Dinas Sosial sebagai lembaga pengirim dapat memantau, memberikan pendampingan dan melakukan pembinaan lanjut bagi warga binaan sosial yang sudah dikembalikan ke masyarakat. Namun pada saat fgd terungkap bahwa pendampingan terhadap eks WBS oleh instansi sosial/instansi pengirim sulit dilakukan karena terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia. Sementara PSBKPL Bekasi juga tidak bisa melakukan binjutan secara keseluruhan di lokasi eks WBS, karena keterbatasan anggaran.

c. Dunia Usaha

PSBKPL melakukan koordinasi dengan dunia usaha untuk dapat menerima eks WBS bekerja di tempat usaha tersebut. Namun tidak semua dunia usaha yang dihubungi PSBKPL Bekasi mau menerima eks WBS bekerja di tempat usahanya. Sertifikat dan surat rekomendasi belum cukup untuk bekal eks WBS untuk diterima bekerja di dunia usaha.

Informan dunia usaha mengatakan keterampilan eks WBS masih dangkal sehingga belum cukup untuk langsung bekerja di tempat usaha, eks WBS masih butuh bimbingan lebih lanjut. Namun demikian menurut peksos ada dunia usaha yang memintak langsung kepada PSBKPL eks WBS yang ingin bekerja, hal ini biasanya dunia usaha dimana WBS ditempatkan untuk PBK, pihak dunia usaha sudah tau kemampuan WBS tersebut. Dunia usaha yang banyak menerima eks WBS adalah bengkel motor.

Merujuk pada pernyataan Sigit dan Nizar (2012), bahwa meskipun kita berada di era modern, dimana segala sesuatu dapat dikendalikan dengan teknologi mutakhir, tetapi kesuksesan lembaga atau organisasi masih sangat bergantung pada keberhasilan menciptakan Jejaring Kerja (*networking*). Kemudian Kaloh (2007) dalam Sipagimbar (2013) mengatakan bahwa dalam kondisi yang kompleks, suatu organisasi dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik, bila dikerjakan bersama-sama pihak lain, saling bekerja sama, saling percaya-mempercayai, dan saling mendukung. Menciptakan jejaring kerja dengan menghimpun kekuatan, tetapi menyebarkan apa yang ada pada suatu organisasi dan mendorong pihak lain melakukan hal yang sama. Hal ini sejalan dengan apa yang

dilakukan oleh PSBKPL Bekasi, sebagian besar pelaksanaan kegiatan baik pada pra rehabilitasi (pra intervensi) maupun dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, PSBKPL Bekasi melakukannya dengan jejaring kerja yang dianggap mampu menjalin kerjasama yang baik. PSBKPL melakukan jejaring kerja dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat secara kelompok maupun perorangan.

PSBKPL Bekasi mempunyai tanggung jawab sosial dan moral terhadap keberhasilan pelayanan dan rehabilitasi terhadap warga binaan sosial sebagai warga binaan sosial. Tanggung jawab tersebut juga menjadi sangat luas ketika penerima pemanfaat dan masyarakat sebagai individu maupun komunitas yang berperan sebagai pemantau atau sebagai penilai kinerja panti yang diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Artinya dapat membentuk manusia seutuhnya ketika sudah diberi pelayanan, bimbingan dan rehabilitasi di PSBKPL Bekasi. Untuk itu PSBKPL sebagai lembaga yang berperan membentuk manusia seutuhnya, dituntut selalu berusaha untuk memberikan pelayanan prima terhadap warga binaan sosial. Ketika PSBKPL Bekasi memberikan pelayanan, bimbingan dan rehabilitasi kepada warga binaan sosial, dan mendapatkan hasil yang optimal, akan meningkatkan posisi tawar warga binaan sosial ketika masih berada dalam panti dan setelah kembali ke masyarakat. Artinya dengan pelayanan, bimbingan dan rehabilitasi yang diberikan, eks warga binaan sosial memiliki keahlian yang mampu memberikan nilai yang memposisikannya ke personil yang dibutuhkan di pasar kerja maupun di masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut PSBKPL sudah melakukan tahapan kegiatan pelayanan sosial dan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas tubuh dengan berkolaborasi dengan jejaring kerja.

Jejaring kerja begitu bermanfaat bagi eks warga binaan sosial, eks warga binaan sosial mengatakan, setelah selesai mengikuti program rehabilitasi di PSBKPL, belum sepenuhnya eks warga binaan sosial mampu berwirausaha sendiri, selain merasa belum mampu bekerja sendiri, stimulan berupa tolkit/peralatan keterampilan yang diberikan dari PSBKPL Bekasi masih belum lengkap dan belum mempunyai lahan/tempat untuk melakukan usaha. Sehingga membutuhkan lembaga lain untuk memberi peluang kerja bagi mereka. Dari eks warga binaan sosial terungkap juga bahwa, mereka sangat membutuhkan dukungan dari instansi terkait terutama instansi sosial, untuk memfasilitasi mereka mendapatkan tempat usaha bagi yang sudah mampu berwirausaha, dan mendapatkan kelengkapan peralatan usaha yang sudah diberikan oleh PSBKPL Bekasi. Namun hal tersebut belum didapatkan oleh eks warga binaan sosial dari instansi terkait setempat.

Jejaring kerja yang dibangun PSBKPL Bekasi, mampu meningkatkan kinerja PSBKPL, dan memberi kemudahan bagi PSBKPL dalam melaksanakan kegiatannya. Seperti yang dikatakan pekerja sosial dengan adanya jejaring kerja seperti dengan dunia usaha, pelaksanaan PBK bagi WBS dapat dilaksanakan dengan lancar, demikian juga dengan pihak kesehatan dan lainnya dapat meningkatkan kinerja PSBK.

KESIMPULAN

Berdasarkan bahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PSBKPL Bekasi melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas tubuh melalui tahap-tahap kegiatan yang telah direncanakan. Setiap tahapan kegiatan dilaksanakan oleh pekerja sosial dan struktural serta tenaga fungsional lainnya, berkolaborasi dengan jejaring

kerja. Walaupun PSBKPL telah memiliki SDM untuk melaksanakan tahapan kegiatan tersebut, untuk mencapai keberhasilan yang optimal, PSBKPL Bekasi tidak bekerja sendiri baik pada tahap pra rehabilitasi (pra intervensi), pada saat rehabilitasi (intervensi) dan pasca rehabilitasi. PSBKPL Bekasi memanfaatkan jejaring kerja yang dianggap peduli dan mampu melakukan kerjasama dengan PSBKPL baik dari instansi pemerintah, swasta. Pada tahap Pra intervensi jejaring kerja PSBKPL Bekasi adalah Instansi Sosial Tk II, Panti sosial, RSUD Bekasi, kepolisian. Pada tahap intervensi, kepolisian, Kantor Urusan Agama, RSUD Bekasi, Lembaga pendidikan dan dunia usaha. Pasca intervensi Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial dan dunia usaha.

2. Peran jejaring kerja pada setiap tahap kegiatan belum dilakukan secara maksimal, seperti pada pasca rehabilitasi, peran instansi terkait/lembaga sosial sebagai lembaga pengirim belum berperan sebagai pendamping dan pembimbing eks warga binaan sosial, sementara ketika warga binaan sosial kembali ke masyarakat, seharusnya yang paling berperan adalah instansi terkait, karena esk warga binaan sosial merupakan tanggung jawab dari lembaga pengirim. Kemudian hubungan kerja antara PSBKPL Bekasi dengan jejaring belum berdasarkan MoU atau perjanjian kerjasama yang memuat tugas dan fungsi masing-masing pelaku.

SARAN

1. Instansi Sosial/Pemerintah Daerah Tk II setempat sebagai lembaga pengirim, perlu dioptimalkan perannya, bukan saja hanya sebagai penyedia data dan pendaftaran calon warga binaan sosial pada tahap pra intervensi, dan pada pasca intervensi dalam rangka pemulangan warga binaan sosial ke masyarakat. Akan tetapi justru setelah warga binaan sosial dikembalikan ke masyarakat sebagai eks warga binaan sosial,

membutuhkan pendampingan dari instansi pengirim. Instansi pengirim/Pemerintah Daerah/instan sosial setempat mempunyai peran penting dalam keberhasilan eks warga binaan sosial untuk mendapatkan kemandiriannya, baik dari segi ekonomi maupun perannya di masyarakat. Ketika eks warga binaan sosial sudah merasa mampu melakukan wira usaha sendiri, sementara belum memiliki lahan untuk tempat berwirausaha maka pemerintah daerah/instansi sosial setempat perlu memfasilitasi untuk mereka berwira usaha. Kemudian peralatan yang diberikan oleh PSBKPL Bekasi ketika warga binaan sosial dikembalikan ke masyarakat, hanyalah bersifat stimulan, artinya tidak semua perlengkapan usaha yang diterima eks warga binaan sosial dapat dilengkapi oleh PSBKPL Bekasi, untuk itu pemerintah daerah perlu memberikan kelengkapan usahanya selain memberikan tempat usaha. Hal ini juga untuk memaksimalkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap warganya yang membutuhkan bimbingan dan bantuan.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan ex warga binaan sosial, sehingga perannya perlu ditingkatkan, bukan saja hanya mengikutkan eks warga binaan sosial untuk mengikuti transmigrasi, tetapi juga PSBKPL Bekasi bersama-sama dengan Disnakertrans mengupayakan sumber penghasilan eks warga binaan sosial, baik usaha mandiri maupun bekerja sebagai pekerja gaji, artinya mendapatkan gaji rutin setiap bulan dengan bekerja di dunia usaha.
3. PSBKPL sebaiknya bekerjasama dengan Dunia usaha bukan hanya pada pelaksanaan PBK, tetapi juga pada pelaksanaan latihan keterampilan dan pasca rehabilitasi guna memberi peluang kerja kepada eks warga binaan sosial. Sedangkan pada pelaksanaan

latihan keterampilan, dunia usaha diperankan sebagai tenaga instruktur keterampilan, karena dunia usaha lebih memahami perkembangan pasar, sehingga pelaksanaan kegiatan keterampilan yang dilaksanakan di PSBKPL bisa menyesuaikan dengan perkembangan pasar/kebutuhan pasar.

4. Tokoh Masyarakat memiliki posisi penting di masyarakat, tokoh masyarakat perlu diperankan sebagai pendamping eks warga binaan sosial, tokoh masyarakat merupakan jejaring kerja yang dapat dioptimalkan dalam pendampingan eks warga binaan sosial, memonitor dan memberi suport atas perkembangan eks warga binaan sosial.
5. Kerjasama dengan Instansi pemerintah maupun dunia usaha perlu di tingkatkan dengan membuat perjanjian kerjasama, guna memperjelas peran masing-masing instansi/ lembaga sehingga dapat berperan penuh dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap WBS sesuai dengan perannya masing-masing, untuk mengatasi permasalahan WBS. Harapan selanjutnya ketika WBS kembali ke masyarakat, mampu mengakses dunia usaha maupun menciptakan usaha sendiri dengan keterampilan yang dimiliki, pada akhirnya eks WBS dapat mandiri.
6. Dalam menentukan keterampilan yang diberikan kepada WBS, bukan hanya berdasarkan minat dan bakat WBS, tetapi juga diarahkan berdasarkan kebutuhan pasar/*marked need*, sehingga tenaga kerja eks WBS akan terserap di pasar kerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan terimakasih kepada nara sumber, teman peneliti dan semua pihak yang telah memberikan masukan untuk kelancaran penulisan naskah ini, mulai dari penelitian, penulisan sampai pada diterbitkannya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya terkait dengan Gelandangan dan Pengemis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, (2013). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Departemen Sosial RI, (2004). *Standarisasi Panti Sosial*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.
-, (2006). *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sistim Panti*. Jakarta : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
-, (2007). *Standart Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*. Jakarta : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
- Fahrudin, A. (2011). *Kesejahteraan Sosial. Sebuah Pengantar*, Jakarta : P3KS Press.
- Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial. (2010), [http://hassansaja.blogspot.com /2010/10/kesejahteraan-dan-pelayanan-sosial.html](http://hassansaja.blogspot.com/2010/10/kesejahteraan-dan-pelayanan-sosial.html), diakses 7-3- 2015
- Maryanto. (2013). *Cara Mudah Membangun Jejaring Kerja (Networking)*, <http://www.bppk.depkeu.go.id/bdpimmagelang/index.php/pojok-sentir/233-cara-mudah-membangun-jejaring-kerja-networking-2>, diakses 20-3-2015.
- Murni, Ruaida (2014). *Pelayanan dan Rehabilitasi Terhadap Gelandang dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 13, No.2, Juni, Jogjakarta. B2P3KS

- Noval, Muhammad, (2008). *Pengembangan Jejaring Litbang Dalam Peningkatan Peran Dan Fungsi Litbang Bagi Pembangunan Daerah (Tinjauan Kebijakan Depdagri)*, <http://noval-labadjo.blogspot.com/2008/07/pengembangan-jejaring-litbang-dalam.html>, diakses 11-3-2015
- Suharto, Edi, (2004). *Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Masalah Sosial Global*, http://www.policy/suharto/modul_a/makindo_33.html, diakses Tanggal 20 -1 - 2015
- Sukoco, Dwi Heru (n.d). *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial, bagian 6; Kemitraan Dalam Pelayanan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosia*. Jakarata : Departemen sosial RI
- Sipagimbar, Putra Banjar, (2013). *Jejaring Kerja Diklat*, <http://sdnegeri2sibuhuan.blogspot.com/2013/05/jejaring-kerja-diklat.html>, diakses tanggal 20 -2-2015
- Sigit, B dan Nizar, (2012). *Membangun Jejaring Kerja dan Kemitraan*, <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0C CIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdiklat.jogjapro.go.id>, diakses 20-2-2015
- Triastuti, S. (2012). *Peranan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum Moyu dan Sleman Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Anak Melalui Keterampilan Sablon*. thesis, Universitas Negeri Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Teori Stakeholder, (2012). <http://anahuraki.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/STAKEHOLDERS.3.pdf>, diakses 7-3-15.
- Widati, Sri, M. Pd., (2012), *Rehabilitasi* .http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.PEND.LUAR_BIASA_/195310141987032-SRI_WIDATI/MK_REHAB/REHABILITASI_PSIKO_FISIKAL.Pdf, diakses 12-2-2015
- Widodo, N dkk. (2009) . *Studi Pelayanan Sosial Remaja Putus Sekolah Terlantar Melalui Panti Sosial Bina Remaja*. Jakarta: P3KS Press
- Widodo, N. (2012). *Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pada Panti Sosial*. Jakarta : P3KS Press.